

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, dimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berpolitik dengan bebas, tanpa tekanan namun tetap dalam koridor hukum dan undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini dilakukan sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk pembangunan bangsa sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan-usulan atau aspirasi-aspirasi yang dimilikinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau alat yang dapat menampung semua aspirasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat tersebut. Dalam hal ini sarana yang dirasa paling tepat dalam menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat tersebut adalah Partai Politik.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Secara historis Indonesia memiliki

gerakan-gerakan Islam yang secara aktif ikut berperan serta dalam membentuk negara ini, begitupun secara politik gerakan Islam juga memberi warna tersendiri bagi arah perjuangan Indonesia. Berkaitan dengan itu menjadi penting untuk diketahui bagaimana umat Islam membentuk masa depan politik Indonesia, maka jadi sangat fundamental mengaitkan politik dengan Islam. Sebab Islam menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dan dominan dalam politik Islam.¹

Salah satu dinamika yang tampak menonjol di Indonesia dewasa ini adalah terjadinya perubahan sistem politik dan sosial yang begitu jelas terlihat dengan maraknya partisipasi politik rakyat baik berupa demonstrasi, seminar-seminar yang bertajuk perubahan ataupun yang lainnya.

Ledakan partisipasi masyarakat Indonesia merupakan konsekuensi logis dari apa yang telah dilakukan oleh rezim Orde Baru selama berkuasa. Seperti telah dipahami bahwa salah satu ciri terpenting perpolitikan Orde Baru adalah terjadinya pemasangan partisipasi rakyat khususnya dalam bidang politik yang diartikan sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh adanya anggapan pemerintahan bahwa berbagai tuntutan dan tingkah laku politik masyarakat yang ingin berperan serta dalam proses politik dan pemerintahan adalah tidak sah dan ilegal.²

Hal senada diperlihatkan oleh *Todung Mulya Lubis* yang menunjukkan besarnya peran negara terhadap berbagai kekuatan kemasyarakatan, serta berbagai

¹ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001 hal 21

² Myron Weiner, *Political Participation: Crisis of the political process, dalam Leonard Binder, et.al. Crisis and sequences in political development* (New Jersey; Princeton University Press, 1971)

regulasi ekonomi dan politik negara secara ketat, telah mengonstruksikan keadaan-keadaan yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tumbuhnya partisipasi politik semu (*pseudo participation*) dan tidak berkembangnya partisipasi efektif³.

Semenjak runtuhnya rezim Orde Baru, Bangsa Indonesia ibarat bangsa yang baru lahir dari dimensi kegelapan menuju pencerahan yang menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Karena dari sinilah awal pijakan untuk mengubah Bangsa ini ke arah perbaikan. Perbaikan dalam segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia termasuk didalamnya aspek-aspek tata pemerintahan bangsa.

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru juga ditandai dengan munculnya partai politik serta gerakan-gerakan yang berorientasi Islam, ini tentunya sebuah kenyataan yang kita cermati secara seksama. Dalam politik Orde Baru hubungan antara Islam dan negara diwarnai dengan antagonistik, Islam dicurigai akan membahayakan ideologi Pancasila dan negara. Sejak awal, Orde Baru dirancang sebagai negara yang kuat dan sentralis, untuk mencapai tujuannya. Bagi kelompok pendukung pemerintahan Orde Baru maka akan mendapat *rewards* baik berupa kedudukan maupun kemudahan lainnya, sebaliknya bagi kelompok penghambat maka tidak segan-segan untuk menghancurkan lawan politiknya tersebut. Strategi ini digunakan secara sistematis melalui perangkat ideologi maupun kelembagaan.⁴ Hubungan yang tidak harmonis itu berdampak luas terhadap umat Islam. Puncaknya adalah akses

³ Todung Mulya Lubis, *In search of human rights; Legal-Political dilemmas of Indonesia's. New order, 1996-1990*, Jakarta: Gramedia dan yayasan SPES, 1993

⁴ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003

aktivis politik Islam kekoridor kekuasaan menyusut drastis dan posisi politik mereka merosot tajam terutama sepanjang 25 tahun Orde Baru berkuasa.

Yang lebih menyedihkan dari itu semua adalah Islam telah menjadi sasaran kecurigaan ideologis. Pada awalnya para aktivis politik Islam menaruh harapan besar terhadap Orde Baru agar posisi umat Islam bisa berkembang lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama. Namun mereka menyaksikan kenyataan yang menyakitkan, dimana posisi umat Islam semakin terdesak oleh kepemimpinan negara.⁵

Ledakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru dimunculkan dengan adanya gerakan reformasi yang menuntut terjadinya perubahan yang berarti yang mampu mengatasi krisis multidimensional di Indonesia. Salah satu konsekuensi logis dari runtuhnya sistem Orde Baru adalah munculnya partai-partai politik baru yang mencoba menawarkan diri untuk *urun rembug* berpartisipasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tercatat sampai dengan September 1998, sekitar 80 partai telah mendeklarasikan partai mereka masing-masing dengan berbagai corak ideologi dan kepentingan⁶.

Partai Keadilan (PK) yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir sebagai salah satu partai politik yang tampilannya berbeda dibandingkan dengan partai politik yang ada. Mengingat PKS sebagai parpol tidak hanya mengedepankan aspek politis dalam sepak terjangnya, tapi juga menjadikan moral

⁵ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia Studi atas Pemikiran Gusdur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hal 153

⁶ Jurnal ISIP Potensia, no.23 th IX, Oktober 1998

agama sebagai basis gerakannya. Sehingga tidak jarang PKS dijuluki sebagai parpol dakwah atau parpol yang tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah.

Partai Keadilan sekarang Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai *muda* dalam percaturan politik di Indonesia merupakan fenomena yang menarik keberadaannya, khususnya dalam pembahasan munculnya partai berbasis Islam ini pada tanggal 9 Agustus 1998, karena sebelumnya partai yang di dominasi oleh kalangan aktivis masjid dan intelektual kampus ini tidak memiliki sejarah politik formal di dalam pemerintahan, baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Mereka diibaratkan sebagai satu generasi baru yang muncul tanpa dinodai oleh kiprah politik dua generasi pemerintah yang penuh getah dosa-dosa politik di zamannya. Demikian yang disampaikan *Dahlan Iskan*; seorang pemimpin surat kabar Jawa Pos ketika beliau menyaksikan deklarasi Partai Keadilan di Gelora Pancasila Surabaya, dengan menyebutkan:

*"...mereka memang para aktivis masjid kampus yang selama Orde Baru bertekad tidak mau kemana-mana karena melihat dimana-mana sudah penuh dengan getah..."*⁷

Tak bisa dipungkiri, cikal bakal lahirnya PKS berasal dari gerakan dakwah para mahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus di luar negeri maupun tanah air. Perjalanan dakwah para aktivis kampus yang dikenal dengan sebutan gerakan Tarbiyah di Indonesia, mulai marak sejak tahun 1990-an, dimana perlawanan terhadap kehidupan yang permissif, hidup tanpa norma, semakin menggejala di

⁷Suara Indonesia, Senin 21 September 1998

kalangan kampus. PKS berusaha memusatkan untuk proses kaderisasi dimulai dari sekolah maupun perguruan tinggi.⁸

Partai Keadilan Sejahtera merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan (PK) yang lahir pada 9 Agustus 1998. Dimana pada Pemilu 1999 PK menempati urutan ke-7 dari 48 kontestan peserta Pemilu dengan meraih suara 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten) Hal ini merupakan suatu fenomena dari keberhasilan PK yang fantastis, walaupun awalnya tidak banyak orang yang tertarik dengan partai ini. Dimana sebelumnya PK dicap sebagai kelompok fundamentalis, eksklusif dan radikal. Tapi, dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai bisa menerima kehadiran PK sebagai sebuah kekuatan politik.⁹

Kemudian pada pemilu 2004, kepercayaan publik terus meningkat. PKS mengalami perolehan suara secara signifikan, walaupun perolehan suara secara nasional bukanlah ternasuk partai dengan suara terbanyak akan tetapi secara general PKS merupakan partai yang memperoleh suara secara signifikan.¹⁰

Sebenarnya posisi PKS cukup strategis, karena selain didukung oleh para pemilih pemula yang rata-rata anak muda, disamping juga mencalonkan sejumlah orang muda yang idealis, parpol ini memiliki nama yang harum, PKS mengerti benar ungkapan Presiden Soekarno tentang pentingnya posisi kaum muda. Itu sebabnya PKS sebagai parpol baru juga tidak ketinggalan merekrut kaum muda yang ini

⁸ Djony Edward, *Efek Bola Salju PKS*, Jakarta : Harakatuna Publishing, 2006 hal xiii

⁹ www.pk-sejahtera.org

¹⁰ smsplus.blogspot.com/2008/02/mengokohkan-jati-diri-dan-citra-pks.html

kemudian banyak disambut oleh kalangan terpelajar. Tentu di mata pemilih pemula PKS adalah partai masa depan karena senantiasa konsisten dengan semangat moral yang bersih dan anti KKN. Selain itu PKS adalah parpol yang secara lantang dan berani mendeklarasikan diri sebagai partai berbasis Syariah Islam yang dikenal sebagai partai dakwah. Adapun data kader PKS dari kalangan pemula yang termasuk kalangan terpelajar ditempatkan Lembaga Survey Indonesia (LSI) dalam salah satu polingnya menempatkan PKS pada urutan ketiga perolehan suara 14,0%, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 19,8% dan Partai Golongan Karya (Golkar), adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Parpol Pilihan Pemilih Pemula

Nama Parpol	Prosentase Perolehan
PDI Perjuangan	19,8%
Partai Golkar	19,3%
Partai Keadilan Sejahtera	14,0%
Partai Kebangkitan Bangsa	11,1%
Partai Amanat Nasional	10,3%
Partai Persatuan Pembangunan	5,8%
Partai Demokrat	4,9%
Partai Bulan Bintang	2,1%
Partai Bintang Reformasi	1,2%
Lan-lain	3,6%
Tak Tahu/Belum memutuskan	7,8%

Sumber: Lembaga Survey Indonesia

Tentu saja tawaran gerakan tarbiyah yang simpatik dan bersahabat bergayung sambut dengan kehausan mahasiswa dan mahasiswi akan siraman rohani yang jernih.

Daya tarik gerakan ini pun terus meningkat, gerakan tarbiyah yang awalnya merupakan gerakan *pheri-pheri*, lama kelamaan menjadi gerakan *mainstream* di kampus. Kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Jakarta (dulu IKIP Jakarta) dan IKIP seluruh Indonesia, Universitas Sumatera Utara seperti menjadi lahan subur bagi gerakan tarbiyah. Tak ketinggalan kampus-kampus swasta seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Trisakti, Jayabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Akuntansi Indonesia, Perbanas, Institut Ilmu Al-Qur'an, Islamic Studies for Education dan Economic (ISTEC), dan sejumlah kampus swasta nasional lainnya di tanah air, menjadi basis gerakan dakwah tarbiyah.

Sebagai sebuah gerakan mahasiswa, gerakan tarbiyah juga memiliki mitra lembaga-lembaga resmi mahasiswa seperti Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Yang terakhir ini justru kemudian menjadi wadah strategis bagi gerakan tarbiyah untuk melebarkan sayap gerakan politiknya di kampus.

Selain melakukan tarbiyah terhadap mahasiswa dan mahasiswi, bahkan sejumlah dosen dan staf kampus, gerakan ini juga kerap menggelar banyak aktivitas. Bahkan secara aktif turun kejalan dengan baju populernya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kemudian dikenal sebagai garda depan ketika

menjatuhkan rezim Soeharto, Habibie dan Gus Dur. Bahkan di masa pemerintahan atau rezim Megawati dan Kasus Akbar Tanjung, KAMMI pun aktif turun ke jalan.¹¹

Pembentukan KAMMI mulai dirintis ketika berlangsungnya acara Forum Silaturahmi Lembaga Da'wah Kampus (FS-LDK) se Indonesia ke-10 pada tanggal 25-29 Maret 1998 di Universitas Muhammadiyah Malang. Acara ini dihadiri oleh 64 perwakilan kampus diseluruh Indonesia dengan 200 peserta yang berasal dari berbagai kampus di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Dalam acara ini disepakati pembentukan KAMMI yang kemudian diketuai oleh Fakhri Hamzah (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia) dan Haryo Setyoko (Mantan ketua KM Keluarga Mahasiswa) Universitas Gajah Mada sebagai sekretarisnya. Pembentukan KAMMI sendiri didasari oleh berbagai alasan, yaitu *pertama* adanya keprihatinan yang dirasakan oleh mahasiswa atas krisis nasional yang terus melanda Indonesia yang kemudian berimplikasi terhadap penderitaan rakyat yang tidak berkesudahan bahkan terus menimbulkan efek domino pada bangsa ini. Kedua, tumbuhnya kesadaran untuk bergerak secara solid dan terorganisir guna menciptakan kekuatan yang dibingkai oleh kekuatan moral sebagai wadah yang concern terhadap permasalahan publik.¹²

Dari tahun ke tahun apabila kita mengikuti maka tergambar jelas bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai kader bukan partai massa karena mereka mempunyai

¹¹ Ibid, hal xiii-xv

¹² Andi Rahmat dan Muhammad Najib; *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus*, Purimedia, 2001, Surakarta

sistem kaderisasi yang menopang internal partai mereka. Oleh karenanya setiap kader Partai ini mengerti bahwa partai politik meniscayakan adanya individu-individu yang menjalankan dan menopang sistem organisasi dari partai sehingga dapat eksis dan bisa menjadi pemenang pemilu. Menurut Djohermansyah Djohan, PKS dikenal sebagai Partai Islam yang kecil tapi kenyal, memiliki kader yang santun dan bersahaja, sehingga mampu menimbulkan rasa hormat baik di lingkungan politisi maupun masyarakat luas.

Di dalam sebuah partai politik, kader adalah tulang punggung dan harapan masa depan partai. Oleh karena itu, perekrutan, pendidikan dan pembinaan kader partai menjadi kunci keberhasilan perjuangan partai. Kader-kader dari berbagai tingkatan dan berbagai kalangan merupakan andalan partai yang perlu terus-menerus memperoleh perhatian peluang, kesempatan untuk mengembangkan diri didalam dan bersama partai melalui pendidikan dan pelatihan politik yang teratur, terencana dan terprogram secara sistematis. Arah pengembangan difokuskan pada perekrutan kader partai yang juga sekaligus kader bangsa, yang siap bertugas dilembaga-lembaga penyelenggara pemerintah negara dan ditengah-tengah masyarakat.

Pada masa reformasi seperti saat ini, partai politik diberikan kebebasan dalam menentukan ideologi partai. Ada partai politik yang mengandalkan ketangguhan ideologi yang dipilih untuk mengumpulkan suara dan dijadikan sebagai massa dari partai. Dan juga ada partai yang mengandalkan kekuatan kader yang dimiliki.

Kekuatan kader dihimpun lewat mekanisme rekrutmen, kemudian setiap kader wajib mengikuti setiap jenjang pelatihan yang telah ditetapkan oleh partai politik tersebut.

Sesuai dengan peran partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, maka partai politik memiliki tugas seperti berikut:

1. Menyiapkan kader-kader pimpinan politik
2. Menyeleksi kader-kader yang dipersiapkan
3. Memperjuangkan untuk menempatkan kader-kader yang berkualitas, berdedikasi serta memiliki kredibilitas yang cukup tinggi.

Melihat perannya sebagai sarana rekrutmen politik, maka sudah menjadi hal yang sangat wajib bagi partai politik untuk senantiasa melakukan sebuah proses pengkaderan didalam tubuh partai itu sendiri. Rekrutmen merupakan salah satu langkah awal dan paling dasar ketika partai akan melakukan proses regenerasi didalam tubuh partai itu sendiri agar menjaga eksistensi partai ke depan.

Dalam konteks pengkaderan, Partai Keadilan Sejahtera mempunyai dasar pemikiran bahwa mendapatkan kader yang tangguh maka diperlukan perekrutan dan pembinaan yang secara khusus dengan cara bertahap. Adapun pentahapan tersebut yaitu dengan membangun kualitas pribadi, sebab dengan kualitas pribadi dapat melahirkan keluarga yang baik, keluarga yang baik dapat pula melahirkan masyarakat yang baik. Mengingat pembangunan sebuah negara memerlukan pribadi dan

masyarakat yang shalih, yang layak memikul amanah yang dibebankan kepadanya, maka individu bertanggung jawab karena ia adalah alat masyarakat dan negara yang terpenting dalam melaksanakan tugas sosial dan politik demi kepentingan dan tujuan bersama.

Berkaitan dengan literatur terdahulu dalam strategi kaderisasi PKS, maka ada 3 tahapan pergerakan yang dilakukan yaitu:

(1) Ta'rif disebut juga tahapan awal (Tamhidiyyah) yang bersifat umum dan terbuka guna memberikan pengenalan dasar mengenai ajaran Islam dan membentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam serta berbagai wawasan dasar keIslaman yang lain.

(2) Takwin secara sederhana diartikan pembentukan. Sedangkan secara definitif berarti proses tarbiyyah yang memiliki sifat khusus yang berfungsi mengokohkan kepribadian Islami dan membentuk kepribadian da'i.

(3) Tanfidz yaitu tahap pelaksanaan kerja yang bersifat khusus untuk membekali dan meningkatkan kemampuan kerja da'wah para kader.¹³

Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimasi potensi dan kemampuan (*istighalul amsal lil kafa'ah*) kader, baik yang berada pada sayap *syar'iyah* maupun *kauniyah* dengan tujuan agar seluruh potensi kader yang

¹³ Mahfudz Siddik, *Risalah da'wah Tulabiyah*, Pustaka Tarbiatuna, September 2001 hal 72-76

terhimpun dapat berkembang dan berfungsi secara optimal, untuk mendukung dan memperkuat gerak dan perkembangan dakwah.

PKS menegaskan keinginan partai itu menempati posisi tiga besar pada Pemilu 2014, sebagaimana diungkapkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka Munas ke-2 PKS. Beliau juga berujar “Saat ini PKS berada di posisi empat besar. Pada Pemilu 2014 mendatang PKS berharap bisa naik menjadi tiga besar. Jika PKS naik kelas menjadi tiga besar kekuatan politik di negeri ini, maka ada salah satu partai dari empat besar partai politik saat ini yang akan tereliminasi”.

Bukti nyata yang telah diperoleh PKS sejak berdiri, PKS telah tiga kali menjadi peserta pemilu legislatif.

Tabel 1.2 Perjalanan PKS di pemilu legislatif

Tahun 1999	Pada Pemilu 1999, PKS mendapat tujuh kursi di DPR RI
Tahun 2004	Pada Pemilu 2004 mendapat 45 kursi DPR RI serta tiga kursi menteri
Tahun 2009	Pada Pemilu 2009 mendapat 57 kursi DPR RI serta empat kursi menteri.

Sumber : <http://www.antaraneews.com/berita/1277054106/pks-mengejar-mimpi-tiga-besar>

PKS akan memperluas basis dukungan massa, tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi juga Non-Muslim. PKS akan lebih membuka ruang seluas-luasnya bagi Non-Muslim untuk bergabung. Untuk itu, dalam Munas ke-2 PKS itu ditetapkan perubahan-perubahan AD/ART partai untuk memberikan ruang bagi Non-Muslim. Namun, klausul keanggotaan Non-Muslim itu tidak secara eksplisit diatur dalam AD/ART baru. Artinya, tidak ada kalimat yang secara jelas menyebut kalangan Non-Muslim bisa menjadi anggota PKS.

Pada 1998 jumlah kader PKS sekitar 30 ribu dan saat ini jumlahnya mencapai 800 ribu kader. PKS menargetkan jumlah kader bertambah hingga 2 juta orang. PKS sendiri sebenarnya juga akan diperluas, tidak hanya terfokus pada daerah perkotaan tetapi juga pedesaan, termasuk juga mendekati kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang merupakan dua ormas Islam terbesar di Indonesia dan dua ormas Islam tersebut telah menyatakan tak keberatan warga mereka didekati untuk bergabung dengan PKS.¹⁴

Beberapa kalangan menilai keberhasilan PKS disebabkan diantaranya oleh ketepatan para kader partai dalam memanfaatkan peluang dan momen strategis untuk merebut perhatian dan hati rakyat dalam perspektif pencitraan partai. Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI, dalam lembaran penutup buku "Evaluasi Pemilihan Umum 2004: Analisis Proses dan Hasil Pemilu Legislatif", mengomentari keberhasilan PKS dalam Pemilu 2004 dengan mengatakan "PKS memperoleh

¹⁴ <http://www.antaraneews.com/berita/1277054106/pks-mengejar-mimpi-tiga-besar>

dukungan suara karena faktor kerja keras yang dilakukannya selama ini dengan keberpihakan kepada rakyat, bersikap jujur, bersih dan peduli.

Ada perbandingan antara PKS dengan parpol yang lainnya yaitu sebagai berikut: (a) PKS adalah partai kader, di Indonesia kebanyakan partai politik yang lain tidak menggunakan partai kader tetapi partai massa. PKS menggunakan sistem pengkaderan sebagai sumber daya yang dianggap penting dalam kepartaian. Sebagai partai kader, tentu agenda kita bagaimana melakukan proses kaderisasi ada perekrutan, pembinaan dan penjenjangan kepartaian sebagaimana diungkapkan Bapak Ardiyanto selaku Ketua DPD PKS Kota Yogyakarta ; dan (b) PKS lebih dirasakan sebagai institusi dakwah ketimbang institusi parpol. Perbedaan dengan parpol lain semakin hari semakin terasa karena memang kebanyakan parpol, kendati bermerek parpol Islam atau parpol berasaskan agama yang lain, lebih pragmatis dalam menatap realitas. Bahkan dalam banyak hal menjadi larut dalam lautan dan rimba politik yang terkesan kotor, itu sebabnya PKS menjadikan terminologi bersih dan lebih peduli sebagai tema sentral perjuangannya. Untuk membuktikan dan menjamin kebersihannya, caleg PKS adalah satu-satunya caleg parpol yang berani menekan kontrak sosial dengan rakyat pemilih.¹⁵

Pemilihan studi di Kota Yogyakarta karena DPD PKS Kota Yogyakarta mendapatkan respon positif dari konstituen wilayah Kota Yogyakarta, hal ini ditunjukkan dengan hasil Pemilu tahun 2004 DPD PKS kota Yogyakarta berhasil

¹⁵ Djony Edward, Op. Cit hal 161

mendudukan wakilnya pada struktur DPRD Kota Yogyakarta sebanyak 5 orang kader. Adapun total perolehan suara suara DPD PKS Kota Yogyakarta pada pemilu 2004 adalah sebesar 24.195 suara. Menurut data yang diperoleh, basis konstituen terbesar secara geografis terletak di Daerah Pemilihan V yaitu Umbulharjo dan Kota Gede. Sementara ditinjau dari sisi sosiologis basis konstituen terbesar PKS DPD Kota Yogyakarta adalah para pemilih pemula, kaum pemuda dan kaum terpelajar (pelajar dan mahasiswa) dan perempuan. Akan tetapi setelah dilakukan pra wawancara dan pencarian dokumentasi belum diketahui jumlah kader mahasiswa kota Yogyakarta yang menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi sayap DPD PKS Kota Yogyakarta yang merepresentasikan para pemilih tersebut. Organisasi sayap DPD PKS Kota Yogyakarta salah satu diantaranya adalah Mahasiswa Keadilan. Mahasiswa Keadilan adalah suatu Organisasi sayap PKS Kota Yogyakarta yang berbasis pada mahasiswa dan bergerak di kalangan mahasiswa baik dari sisi kegiatan maupun rekrutmen kader, akan tetapi Divisi ini sudah tidak ada lagi karena Indonesia membekas yang dilakukan dengan kebijakan NKK/BKK, dan setelah bergulir reformasi bukan berarti partai bisa masuk justru tidak bahkan kampus harus steril , partai politik tidak bisa masuk dan harus ada netralitas kampus.

Adapun pemilihan pada tahun 2004-2010 karena berkaitan dengan kepengurusan yang diwawancarai adalah kepengurusan pak Ardianto selaku ketua DPD periode 2004-2010 sehingga beliau mengetahui strategi yang dijalankan PKS untuk merekrut kader dari segala lapisan masyarakat termasuk mahasiswa, juga

berkaitan dengan persiapan menghadapi pemilu 2009 sehingga banyaknya agenda yang dilakukan PKS yang melibatkan mahasiswa untuk meraih simpati mahasiswa, sebagaimana orasi Mantan ketua DPP PKS Tifatul Sembiring yang menyatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan hampir seluruh kekuatan mahasiswa perguruan tinggi negeri Sumatera dan Jawa telah menjadi basis kekuatan mereka. "Untuk jumlah suara kita tidak targetkan mahasiswa karena cuma 6 juta atau 3 persen dari jumlah pemilih se-Indonesia. Akan tetapi kekuatan mahasiswa terutama perguruan tinggi negeri Sumatera dan Jawa berada dalam jalur koordinasi kita. Inilah yang diungkapkan ketika tanggal 17/1/2009. Sehingga penulis meyakini ada strategi rekrutmen kader yang dilakukan PKS Kota Yogyakarta kepada mahasiswa yang berada disana untuk menambah konstituennya. Yang tentunya ketertarikan mahasiswa ini masuk ke PKS didasari ideologi yang sama dalam menyikapi persoalan.

Sementara ditinjau dari proses rekrutmen PKS mengedepankan rekrutmen anggota pada kader muda yang terletak di organisasi-organisasi kampus, organisasi pelajar dan organisasi kepemudaan. Hal ini merupakan wujud dari PKS dalam menggalang kekuatan intelektual pemuda yang energik, dinamis, visioner dan idealis sebagai agen pembaharu bangsa.

Namun untuk lebih tergambar dengan jelas mengatakan bahwa Partai Keadilan berupaya melakukan strategi kaderisasi pada mahasiswa kampus, maka disini penulis mencoba untuk memaparkan berbagai hal yang kemudian dapat dibuat

kesimpulan mengenai Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Perekrutan Kader Mahasiswa (Studi kasus Kota Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti serta membatasi adanya perluasan masalah dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan agar dapat tercapai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam merekrut Kader Mahasiswa (Studi di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta Periode 2004-2010)?

C. Batasan Permasalahan

Penelitian ini dibatasi pada penjelasan Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Perekrutan Kader Mahasiswa. Studi akan dilakukan pada DPD PKS Kota Yogyakarta tahun 2004-2010, karena Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar sehingga pelajar maupun mahasiswa bisa dijadikan kader-kader yang berkualitas dan berkompeten sehingga kedepannya menjadi pemimpin yang baik serta memiliki idealisme yang tinggi dan memiliki pondasi agama yang kuat sehingga kelak mereka bisa menjadi pemimpin sesuai dengan harapan rakyat. Dalam hal apapun yang ada di

Yogyakarta tentu akan memiliki historis dan perkembangan yang pesat di Yogyakarta dan juga pertimbangan Yogyakarta sebagai ibukota propinsi DIY sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan pariwisata. Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta melakukan usaha perekrutan anggota, usaha perekrutan ini dilakukan melalui kegiatan dan aktivitas rekrutmen, Jumlah kader yang dimiliki berjumlah 5.403 kader terdiri dari 2.354 (ikhwan) dan 3.049 (akhwat).

D. Tujuan Penelitian

Setiap aktifitas penelitian tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh para peneliti. Tujuan Penelitian setidaknya dapat diketahui dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti.

Dengan melihat rumusan masalah tersebut diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Peneliti ingin menjelaskan Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Perekrutan Kader Mahasiswa di Kota Yogyakarta tahun 2004-2010.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain jawaban dari tujuan penelitian yaitu, Penjelasan mengenai Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Perekrutan Kader Mahasiswa dan kendala yang ditemui ketika PKS melakukan perekrutan

terhadap mahasiswa. Melalui penelitian ini diharapkan kedepannya ada kajian yang lebih mendalam dalam meneliti Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam perekrutan kader dari lapisan masyarakat manapun.

Adapun kegunaan teoritis berkaitan dengan skripsi yang diambil penulis adalah dapat mengetahui pemikiran dan ideologi politik, komunikasi politik, perilaku politik dan analisa kekuatan politik suatu organisasi terutama studi yang diteliti yaitu PKS, serta dapat mengetahui pola manajemen Sumber Daya Manusia yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera.

F. Kerangka Dasar Teori

Di dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang terpenting, karena di dalam kerangka dasar teori akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berpikir atau titik tolak dalam pemikiran. Oleh karena itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti.¹⁶

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau

¹⁶ Nawawi, Metode Penelitian Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995 hal 39-40

dengan lainnya dengan data dasar yang diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁷

Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik.¹⁸

Dalam pengertian lain rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.¹⁹

Peran Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil cukup besar dalam hal : (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik, (2) selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, (3) Perjuangan untuk penempatan kader berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002 hal 34-35

¹⁸ Fadilah Putri, *Kebijakan Publik Analisis terhadap kongruensi janji politik partai dengan realisasi produk kebijakan publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003 hal 19

¹⁹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Press, 1995 hal 121

Oleh karena itu, Keberadaan suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh pakar politik Ramlan Surbakti, bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran.²⁰

Sebagai sarana rekrutmen politik yakni proses melalui dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pimpinan bangsa.²¹

Dengan adanya anggota-anggota partai politik yang berbakat dipersiapkan untuk menjadi pemimpin melalui pengkaderan, berarti proses

²⁰ <http://cetak.bangkapos.com/opini/read/270.html>

²¹ Mukhtie Fadjar, *Partai Politik dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia*, In-TRANS Publishing, Malang, 2008 hal 23

regenerasi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan akan berjalan dengan lancar dan dengan lancarnya proses regenerasi berarti pula kelangsungan hidup partai politik tersebut. Melalui pengkaderan yang berlangsung dengan baik akan muncul calon-calon pemimpin yang baik pula. Maka itu cara pengkaderan, lebih sering dipergunakan untuk merekrut kaum muda, baik yang berasal dari anggota partai maupun berasal dari masyarakat umum untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin.

Ada beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik sebagai berikut:²²

1. *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.

Gabriel Almond mengemukakan dalam bukunya Arifin Rahman pada sistem politik Indonesia ada 5 sistem rekrutmen politik yaitu:

²² Skripsi Rekrutmen Politik terhadap Perempuan dalam partai politik dan parlemen oleh Fanina Fanindita, Ilmu Politik: Universitas Sumatera Utara, 2009

1. Sistem Terbuka, yaitu sistem rekrutmen politik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada semua orang/masyarakat untuk bergabung dalam partai politik.
2. Sistem Tertutup, yaitu sistem rekrutmen politik yang dilakukan dengan sistem seleksi dengan melihat karakteristik tertentu yang ada pada individu ataupun masyarakat seperti kelompok, suku, agama dan ras.
3. Sistem rotasi, sistem ini terbagi dalam dua pola rekrutmen politik, antara lain rekrutmen yang didasarkan atas masa jabatan yang sudah ditentukan, misalnya jabatan pada legislatif dan eksekutif. Sedangkan sistem rotasi pilih kasih cenderung pada hal rekrutmen politik yang berdasarkan kepentingan, dengan kata lain merupakan hak prerogatif elit partai.
4. Sistem kudeta adalah bentuk rekrutmen politik yang dilakukan secara paksaan ataupun kekerasan untuk dapat bergabung dalam satu organisasi kepartaian, cenderung pada partai komunis
5. Sistem patronase, yaitu suatu bentuk rekrutmen politik yang dilakukan dengan cara penyuaipan atau nepotisme, akan tetapi tidak dibuktikan dengan hukum.²³

²³ Skripsi Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara dalam memenangkan pasangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 oleh Bukhari Ridho Siregar, Ilmu Politik: Universitas Sumatera Utara, 2009

2. Partai Politik

a. Sejarah Partai Politik

Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik moderen, yang bersendikan perwakilan politik. Negara moderen yang tidak memungkinkan lagi menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi sosial dari warga negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial politik yang memungkinkan warga negara sebagai pemilik negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah perjalanan kehidupan bersama. Di antara lembaga dan struktur politik itu adalah badan perwakilan dan partai politik.

Keberadaan Partai Politik di Indonesia sendiri telah dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda mencanangkan Politik Etis pada tahun 1908. Dengan adanya Politik Etis ini, maka banyak kalangan cerdik pandai kaum Bumiputera yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Pelopor utama dari organisasi kemasyarakatan tersebut adalah Boedi Oetomo. Dinamika sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia turut merubah tatanan partai politik di tanah air. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 maka telah diundangkan berbagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi dan mengatur berbagai aspek mengenai partai politik. Hal ini

menyebabkan bermunculannya partai politik dengan berbagai ideologi yang mengusung dan memperjuangkan visi dan misinya masing-masing.

b. Pengertian Partai Politik

Dalam kehidupan dunia perpolitikan, partai politik merupakan suatu hal yang berperan sangat vital. Partai politik tidak hanya merupakan kendaraan politik dalam mendapatkan kekuasaan, ada banyak definisi mengenai partai politik menurut para ahli.

Menurut Roy C. Macridis, Partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.²⁴ Menurut pendapat Rusadi Kantaprawira, Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective), dan mempunyai program politik (political platform, material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara

²⁴ Ahmad Farhan Hamid. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta : Kemitraan

lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa.²⁵

Menurut Miriam Budiarto, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.²⁶ Menurut Gabriel A. Almond, partai politik adalah organisasi manusia dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai partai politik.²⁷

Merujuk pada pendapat Mark N. Hagopian, partai politik didefinisikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam suatu pemilihan.²⁸

²⁵ ibid

²⁶ Miriam Budiarto 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

²⁷ <http://www.indolisme.blogspot.com>

²⁸ Hagopian, Mark N, *Regimes Movements and Ideologies*, New York and London ; Longman 1978

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan pengertian Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa definisi berikut, terdapat batasan-batasan yang jelas terlihat bahwasanya basis dari suatu partai adalah adanya ideologi dan kepentingan yang mengarah pada usaha untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini sangat penting dan mendasar dari suatu partai. Karena tanpa hal tersebut partai tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para pendukung.²⁹

Dengan demikian Partai Politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

c. Fungsi Partai Politik

Selain memberikan pendidikan yang berupa politik, ada banyak lagi fungsi dari partai politik menurut beberapa sumber diantaranya:³⁰

²⁹ Yofa Pratama M.P, *Skripsi Strategi kampanye Politik* , Perpustakaan FISIP UNS 1999

³⁰ Fadillah Putra, *Partai Politik dan kebijakan publik*, Averroes Press, Yogyakarta 2003, Hal. 9

1). Fungsi artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil kelompok yang berada dalam lembaga legislatif, sehingga kepentingan, tuntutan dan kebutuhan dari kelompoknya bisa terwakili dan terlindungi dan pembuatan kebijakan.

2). Fungsi agregasi Kepentingan

Agresi kepentingan merupakan cara yang digunakan untuk melancarkan tuntutan oleh kelompok-kelompok yang berbeda yang digabungkan menjadi alternatif-alternatif dalam pembuatan kebijakan.

3). Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang dianut dan berlaku oleh suatu negara. Ada dua hal yang penting dalam sosialisasi politik ini, yang pertama bahwa sosialisasi politik terus berjalan selama hidup seseorang. Terbentuk dimulai dari masa kanak-kanak yang kemudian akan disesuaikan dan diperkuat saat mengalami berbagai pengalaman sosial, pendidikan, dan pengaruh dari pergaulan. Yang kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran.

4). Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif

maupun untuk politik. Setiap partai politik memiliki mamiliki pola rekrutmen yang berbeda, yang disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.

5). Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.

Sedangkan menurut pasal 7 UU No. 31 tahun 2002 Tentang Parpol, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- 1). Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2). Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- 3). Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 4). Partisipasi politik warga negara
- 5). Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

d. Tujuan Partai Politik

Partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar persamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, sudah tentu mempunyai tujuan tertentu. Partai politik menggalang dukungan warga negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sumber daya yang dimiliki oleh partai politik terus menerus dikonsolidasikan untuk membangun solideritas, memperkokoh komitmen untuk mewujudkan cita-citanya. Sebagai sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu mengartikulasikan, mengagregasikan berbagai kepentingan dan memperjuangkannya untuk dikonversikan menjadi keputusan politik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan partai politik pada dasarnya adalah keadaan yang dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan yang kuat.³¹

Didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan khusus yaitu :

³¹ Oka Mahendra Soekady, 2004. *Prospek Partai Politik Pasca 2004*. Jayasan Pancur Siwah.

- 1) a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu menerangkan juga bahwa Partai Politik yang terlibat dalam Pemilu mempunyai tujuan untuk:

- 1) Melaksanakan pendidikan politik
- 2) Melaksanakan agregasi dan artikulasi kepentingan

3) Melakukan rekrutmen publik untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif.³²

e. Peranan Partai Politik dalam Parlemen di Indonesia

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum yang di dalamnya terjadi kompetisi antarpol dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya.

Partai politik merupakan institusi demokrasi yang secara langsung menentukan kualitas demokrasi. Posisi signifikan parpol ini disebabkan fungsi dan perannya di pemilu, pilukada dan lembaga legislatif baik di pusat maupun daerah. Keika pemilu dan pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi dan menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, capres dan cawapres, serta para calon legislatif di pusat dan daerah. Sebelum menghadapi pemilu dan pilukada untuk dipilih oleh rakyat.

³² ibid

f. Jenis-jenis Partai Politik

Perbedaan partai politik di berbagai negara diidentifikasi melalui basis sosiologi partai politik tersebut. Sedikitnya terdapat lima jenis partai yang dapat dikenali berdasarkan basis ideologi, yakni :

(1) Partai Proto

Partai ini belum memiliki organisasi dan hanya merupakan pengelompokan kepentingan daerah atau ideologi yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota dengan non anggota. Partai proto belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern.

(2) Partai Massa

Partai Massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politisi dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa dibentuk di luar perlemen (extraparlemen). Partai tipe ini berorientasi pada basis pendukung yang lebih luas, seperti; buruh, petani, kelompok agama dan memiliki ideologi yang jelas untuk memobilisasi massa

serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi dalam mewujudkan tujuan ideologisnya.

(3) Partai Kader

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat sehingga bergantung pada masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktifitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Kelahiran partai ini biasanya dari dalam parlemen (intra-parlemen). Orientasi partai kader adalah pada pendidikan politik dan kurang mementingkan massa.

(4) Partai Ditaktoral

Partai ditaktoral merupakan sub tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat kepada pengurus dan anggota. Untuk diterima sebagai anggota partai seseorang harus lebih dahulu diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai. Partai radikal menuntut pengabdian total dari para anggotanya.

(5) Partai *Catch-all*.

Partai *Catch-all* sebut juga *umbrella party* (partai payung), merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah partai *catch-all* pertama kali diperkenalkan oleh Otto Kirchheimer. Istilah ini merujuk pada perhimpunan yang menampung kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

Pemetaan parpol di Indonesia, Dilihat dari pembentukannya partai dapat dibedakan menjadi :

- (1) Partai Afeksi, Partai yang didirikan berdasarkan kecintaan para anggotanya terhadap orang atau keturunannya.
- (2) Partai yang didirikan berdasarkan kepentingan para anggotanya.
- (3) Partai Ideologi/ Agama, Partai yang berdasarkan persamaan agama atau cita-cita politik diantara para anggotanya.

Dilihat dari segi anggotanya terhadap keadaan yang dihadapi partai politik di Indonesia, partai politik terbagi menjadi 4:³³

³³ Skripsi Kedudukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam ditinjau dari asas demokrasi oleh Edwin Yustian Driyartana, Ilmu Hukum: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

(1) Partai Radikal

Partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin merubahnya dengan cepat keadaan tersebut sampai ke akar-akarnya.

(2) Partai Progresif

Partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin merubahnya secara berangsur-angsur (evolusi).

(3) Partai Konservatif

Partai yang mudah puas dengan keadaan yang sekarang dan ingin mempertahankan keadaan itu.

(4) Partai Reaksioner

Partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin kembali kepada keadaan di masa lampau.

3. Mahasiswa/Mahasiswi dan Partai Politik

Dalam kaitannya dengan merealisasikan kehidupan politik yang semakin demokratis, tentu membutuhkan peran serta seluruh komponen masyarakat, terutama para generasi muda yang terdidik, termasuk mahasiswa. Mereka sering dijuluki sebagai *agent of modernization* dan kadang dinamai dengan *agent of change*.

Mahasiswa menurut Lewis Coser, adalah:

“Orang-orang yang kelihatannya tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas.”³⁴

Tidak berbeda dengan Lewis Coser, Edward Shils mengemukakan bahwa mahasiswa dalam pandangannya sebagai kaum cendekiawan yang mencari kebenaran.³⁵

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah individu-individu yang sedang melaksanakan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi seperti institut, universitas, sekolah tinggi, akademi dan lainnya yang sederajat. Dimana mereka selalu mencari kebenaran dan mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Seharusnya mahasiswa sebagai generasi muda yang membawa perubahan dapat memadukan antara kepentingan masyarakat dengan pemikiran-pemikirannya untuk dipadukan dan menciptakan sistem pemerintahan yang baru yang sesuai dimasa demokrasi transisi sekarang ini dan yang akan datang.

4. Gerakan Islam Politik

Untuk menjelaskan apa itu gerakan Islam, maka perlu dijelaskan pada bagian ini dimulai dari definisi gerakan sosial. Oleh karena gerakan Islam itu sendiri bagian dari gerakan sosial.

³⁴ Alfian Darmawan, *Mahasiswa dan Masa Depan Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1995
hal 107

³⁵ Ibid

Gerakan Sosial adalah salah satu bentuk dari perilaku kolektif (*collective behavior*), akan tetapi ada perbedaan antara Gerakan Sosial dan perilaku kolektif. Apa yang membedakannya dari perilaku kolektif?³⁶

- a. Gerakan sosial memiliki pengorganisasian yang lebih rapi
- b. Gerakan sosial dibuat secara sengaja dan terencana dengan baik
- c. Bisa berlangsung sangat lama

Aswab Mahassin mencoba memetakan anatomi gerakan sosial melalui tiga indikator yang paling tidak melalui ketiga indikator tersebut mampu diperoleh dan dianalogikan dan diperoleh profil sebuah gerakan sosial dengan beberapa ciri. Ketiga indikator tersebut adalah:

- a. Gerakan massa

Aswab Mahassin menyebutkan bahwa kebanyakan gerakan massa diprakarsai oleh golongan menengah sedangkan kelompok bawah seringkali menjadi objek dari sebuah gerakan yang dilakukan oleh kelompok menengah tersebut. Keberhasilan sebuah gerakan sosial dalam hal ini ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dari gerakan tersebut. Indikator kualitas massa dalam gerakan, menurut *Gellner* ditentukan oleh tingkat kesadaran dan rasionalitas massa dari gerakan tersebut. Sedangkan dari kuantitas, George Simmel mengatakan bahwa kuantitas massa merupakan variabel yang sangat menentukan bagi sebuah kinerja gerakan massa dalam menjalankan roda pergerakan organisasi mereka.

³⁶ David A Locher, *Collective Behaviour*, New Jersey: Pearson Education. 2002. Hal 223

b. Ideologi dan tema

Ideologi dan tema dari sebuah gerakan massa seringkali menjadikan kejayaan dan romantisme masa lalu sebagai motivator penggerak dan melahirkan sebuah energi pergerakan yang cukup kuat. Dalam kasus pergerakan agama, romantisme akan kejayaan dan kegemilangan zaman keemasan para nabi dan khalifah seringkali menjadi bahan acuan dari bahan bakar penyemangat motivasi yang sering digunakan.

c. Organisasi, strategi dan taktik yang digunakan

Suatu gerakan umumnya selalu memakai berbagai kegiatan seperti kelompok-kelompok diskusi, perkumpulan atau yayasan yang bergerak di bidang tertentu atau berbagai bentuk komunitas yang pada akhirnya meluas menjadi sebuah pergerakan. Gerakan yang dimaksud bisa berbagai bentuk, salah satunya adalah partai politik.

Munawir Sjadzali memberikan beberapa alasan melatarbelakangi pemikiran politik pada abad ke 19 tersebut. Pertama, kemunduran dunia Islam yang mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan pembaharuan keagamaan. Kedua, dominasi kekuasaan Barat terhadap sebagian yang sebagian besar dunia Islam yang berakibat rusaknya hubungan antara Islam dan Barat dan

menimbulkan rasa permusuhan serta sikap anti Barat. Ketiga, keunggulan peradaban Barat dalam bidang ilmu dan teknologi.³⁷

Implikasi dari hal tersebut di atas tercermin dari corak gerakan pembaharuan yang muncul dan menjadi cikal bakal tumbuhnya perbedaan aliran pemikiran Islam. *Aliran pertama* berpendapat bahwa bahwa Islam bukanlah agama sebagaimana pandangan dunia Barat, Islam adalah pandangan hidup yang lengkap termasuk di dalamnya politik dan pemerintahan (ketatanegaraan) seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan empat khalifah penerusnya. Sehingga umat Islam tidak perlu meniru dan tidak perlu mencontoh Barat. *Aliran kedua* juga menghendaki pemurnian Islam tetapi harus disesuaikan dengan situasi zaman. Adapun dalam bidang politik dan pemerintahan umat Islam harus dapat secara selektif mencontoh Barat. *Aliran ketiga* menganggap bahwa pembaharuan pemikiran Islam berarti menganggap pengertian agama sama dengan pengertian Barat. Agama hanya merupakan pengaturan hubungan antara makhluk dan penciptanya sedangkan dalam urusan politik dan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada manusia itu sendiri.³⁸

³⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press. 1990 hal 111

³⁸ Ibid. hal 115

G. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi hal pokok perhatian. Definisi Konsepsional adalah suatu abstraksi dari kerangka dasar teori. Oleh karena itu dapat dijelaskan definisi Konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konsepsional dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.
2. Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, dan mempunyai program politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan dalam pentahapan jangka pendek sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa.
3. Mahasiswa adalah individu-individu yang sedang melaksanakan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi seperti institut, universitas, sekolah tinggi, akademi dan lainnya yang sederajat.
4. Gerakan Islam Politik adalah suatu badan yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki ideologi Islam untuk mewujudkan visi, misi, strategi atau taktik dari badan atau organisasi.

H. Definisi Operasional

Menurut Koentjaraningrat (1999) yang dimaksud dengan definisi operasional adalah “usaha untuk mengubah konsep-konsep yang berupa construct dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”³⁹. Adapun menurut Saifudin Anwar, Definisi Operasional adalah batasan atau definisi suatu variable agar tidak terjadi ambigu yaitu memiliki makna ganda dan tidak jelas.⁴⁰ Definisi Operasional yang penulis gunakan untuk melihat partai kader di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Strategi DPD PKS Kota Yogyakarta dalam Rekrutmen Kader Mahasiswa
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PKS dalam Rekrutmen Kader Mahasiswa

I. Metodologi Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan unsur yang sangat penting, karena metode adalah upaya ilmiah menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengolah obyek menjadi sasaran ilmu yang sedang diselidiki.

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

³⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hal 75

⁴⁰ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, 2003, hal 72

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena mengutamakan kualitas analisis serta interpretasi data bukan menggunakan data-data statistik. Metode Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴¹

Studi ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif diadakan untuk menggambarkan realitas sosial sedemikian rupa.⁴²

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu data primer maupun data sekunder.

- a. Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, asli baik berbentuk dokumen ataupun berupa peninggalan lain. Atau data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, baik mendukung maupun yang melemahkannya dan data tersebut berkaitan erat

⁴¹ Jerome Kirk dan MacMiller, *Reliability and Validity Research*. Dalam Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.1989.halaman 2-3

⁴² Lexy J Maleong, *op.cit*.halaman 3

dengan variabel pokok.⁴³ Adapun pihak-pihak yang berkompeten ini adalah pihak atau individu yang mempunyai tingkat pengaruh tinggi di dalam DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

- b. Sumber sekunder adalah data yang melengkapi data primer, mendukung data primer maupun mendukung proyek penelitian.⁴⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Untuk mendapatkan data, penyusun menggunakan cara :

- a. Interview

Interview berasal dari dua kata yaitu inter dan view. Secara leksikografi berarti saling melihat atau saling bertukar pikiran. Interview adalah teknik menggali, menemukan atau menjangkau informasi atau pendapat secara langsung dengan jalan berkomunikasi dengan memakai bahasa.⁴⁵ Atau bisa juga diartikan sebagai usaha mendapatkan informasi melalui wawancara, Teknik wawancara ini dilakukan karena penulis ingin mendapatkan

⁴³ Taliziduhu Ndraha, *Research teori, metodologi, administrasi*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981

⁴⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998

⁴⁵ Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit*

informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Perekrutan Kader Mahasiswa di Kota Yogyakarta tahun 2004-2010. Responden yang akan diwawancarai adalah pengurus harian DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Yogyakarta.

b. Observasi

Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi, yakni memperhatikan atau mengadakan pengamatan dengan menggunakan panca indera. Kegiatan ini dilakukan secara pasif atau bersifat non partisipasi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, jurnal, kolom dalam media massa yang bermanfaat untuk melengkapi informasi terhadap penelitian tentang strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Perekrutan Kader Mahasiswa di Kota Yogyakarta.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu kegiatan yang menjelaskan tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kuantitatif. Teknis analisis data adalah pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang diadakan berupa pengumpulan data,

kemudian data direduksi sehingga diperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara marerial atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan / verifikasi dan akan diperoleh kebenaran obyektif. Teknik analisa data yaitu memahami makna dari suatu ucapan, statemen atau tindakan sesuai dengan konteks.

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa tahapan analisa seperti yang umum yaitu proses pengumpulan data, kemudian memulai dan menganalisa data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Ada berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besar penelitian ini mengikuti prosedur dan langkah-langkah berikut:⁴⁶ (a) reduksi data; (b) *display data* dan (c) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Reduksi data yang berarti sebagai suatu proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, yang terus menerus selama proyek berorientasi kualitatif berlangsung. Maka, informasi yang tidak diperlukan dibuang atau direduksi agar tidak mengganggu proses analisis.

⁴⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-5. 2004. Halaman 86

Display data, Data yang direduksi, ditampilkan atau disajikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan dari penarikan kesimpulan dalam bentuk tertentu atau dalam suatu data telah terorganisasi.

Pengambilan kesimpulan, merupakan hasil akhir dalam penelitian kualitatif. Dalam tahap ini peneliti berusaha menginterpretasikan dan memberikan makna yang penuh dari data yang terkumpul.

Data yang akan dianalisis adalah data yang diperoleh dari wawancara tentang strategi rekrutmen kader dan dokumen resmi Partai Keadilan Sejahtera untuk keabsahan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan berhubungan.

Kajian mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam merekrut Kader Mahasiswa di Kota Yogyakarta tahun 2004-2010 terbagi menjadi empat bab. Pada bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka dasar teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan dibahas mengenai profil Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah organisasi pergerakan Islam. Meliputi antara lain, sejarah kemunculannya (proses pembentukannya) di Indonesia, struktur organisasi, visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera serta program kerja. Bab ini akan menjelaskan pula tahapan pergerakan Partai Keadilan Sejahtera yang berlandaskan Islam.

Bab ketiga akan membahas strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Perekrutan Kader Mahasiswa di Kota Yogyakarta.

Bab keempat, menarik kesimpulan secara menyeluruh dari uraian skripsi dan memberikan saran-saran dan kata penutup.